



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**RABU, 30 JANUARI 2019**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Pemkot Diminta Tanggung Jawab**

**BENGKULU, BE** - Komisi III DPRD Kota Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke gedung PGRI Kota Bengkulu yang telah dirusak oleh Orang Tak Dikenal (OTD), kemarin (29/1).

► *Baca Pemkot ...Hal 13*

Dalam pantauan tersebut, dewan melihat kondisi gedung sudah rusak parah, dan seolah-olah memang dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah kota. Padahal, gedung tersebut dibangun dengan anggaran APBD Kota Bengkulu 2017 sekitar Rp 400 juta.

Namun, sejak selesai dibangun, Pemkot tak kunjung melakukan serah terima kepada PGRI, sehingga hampir 1 tahun dibiarkan kosong, dan akhirnya menjadi sasaran oknum untuk mengambil barang-barang di dalam gedung tersebut.

"Kita prihatin sekali melihat kondisi gedung ini, padahal gedung ini sudah 80 persen selesai, tetapi tidak ditindaklanjuti. Kemudian

dibiarkan terbengkalai, akhirnya sebagian material bangunan ini sudah banyak yang hilang. Nah, ini siapa yang harus bertanggung jawab," kata Ketua Komisi III, Sudisman SSos.

Kondisi gedung tersebut terletak yang sedikit tertutup hutan, dan jauh dari keramaian, ditambah lagi tidak ada pengawasan apapun dari pemerintah kota sehingga oknum warga sangat leluasa untuk keluar masuk dan merusak gedung tersebut.

Setelah ditelusuri instalasi listrik di gedung tersebut, ternyata juga sudah hilang. Bahkan, kabel listrik sudah dipotong-potong untuk diambil besi tembaganya.

Kemudian, rangka baja

jendela dan pintu serta kaca juga sudah dicuri. Tak hanya mencuri, pelaku juga dengan sengaja menjebolkan dinding bangunan.

Anggota Komisi III DPRD Kota, Sandy Bernando ST mengaku cukup kecewa dengan kondisi gedung tersebut yang dibiarkan terbengkalai dan hancur tanpa ada laporan.

Menurutnya, proyek ini sama dengan menghamburkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini susah untuk dikumpulkan.

"Kok bisa tidak difungsikan, padahal sudah selesai setahun lalu. Ini sangat mengecewakan kita sebagai dewan, jangan sampai ini nanti jadi lebih hancur lagi," tegasnya.

Oleh sebab itu, dalam waktu

dekat pihaknya akan menggelar hearing dengan mengundang dinas teknis, seperti Dinas PUPR, PGRI, Dinas Pendidikan, dan Bidang Aset Daerah untuk mempertanyakan seperti apa permasalahan ini terjadi.

Selain itu, dewan juga mendesak pemkot untuk segera memperbaiki gedung tersebut agar bisa difungsikan sesuai harapan awal yakni sekretariat para guru.

"Ini harus jadi evaluasi, dan kita meminta Pemkot untuk menentukan langkah apa yang harus diambil sekarang, paling tidak harus ada upaya penyelamatan aset, dan yang tersisa sekarang jangan sampai hilang lagi," pungkas Politisi Golkar ini. (805)